

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.
- Budiman N.P.D Sinaga, *Aspek Hukum Maritim, Minyak, dan Gas Bumi*, dalam <http://www.npds.com> diakses 29 November 2010. 20.14 WIB.
- Chairul Anwar, 1989, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta: Djambatan
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia.
- Huala Adolf, 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Joko Subagyo, P, 2002. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Laode M. Kamaluddin, 2002, *Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung,
- Rudi M. Simamora, 2000. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djambatan.
- Salim H.S, 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Starke, J.G, 1989. *Hukum Internasional I*, alih bahasa Sumitro L.S Danuredjo, Jakarta: Aksara Persada Indonesia,
- Sudargo Santoso, 1992. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina,

Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak *Production Sharing*.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

8. Peraturan Pemerintah tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak